



News Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

PUSAT
INFORMASI
AGRI BISNIS

Edisi 07/NL/07/2015

Juli 2015

**Kinerja Mentan
Dapat Apresiasi Dari Presiden**

**Kementan Beri Apresiasi Keberhasilan
Swasembada Pangan Di Sulsel**

**Lewat Momentum Halal Bi Halal, Mentan Apresiasi
Kinerja PNS Lingkup Kementan**



Kinerja Mentan Dapat Apresiasi Dari Presiden	03
Kementan Beri Apresiasi Keberhasilan Swasembada Pangan Di Sulsel	04
Lewat Momentum Halal Bi Halal Mentan Apresiasi Kinerja PNS Lingkup Kementan	06
Pejabat Tinggi Madya Punya Peran Strategis Untuk Capai Target Swasembada	07
Untuk Capai Target Swasembada Pangan Kementan Butuh Pejabat Berkualitas	08
Perlunya Sinergi Semua Pihak Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan	10
Produksi Padi Nasional Meningkatkan Swasembada Pangan Dapat Terwujud	11
Pembangunan Sistem Pengairan Jadi Fokus Pemerintah	13
Antisipasi Ancaman Kekeringan, Kementan Tinjau Langsung dan Berikan Bantuan	14
Kementan Naikan Bantuan Dana UPSUS Untuk Jadikan Sulteng Lumbung Jagung Nasional	16
Pemerintah Tetapkan NTB Jadi Lumbung Jagung Nasional	17
BULOG Siap Serap Gabah Yang Dijual Petani	19
Kementan Akan Kembangkan Perkebunan Buah Skala Nasional	21
Bahas Serapan Beras Mentan Briefing Pejabat Lingkup Kementan	22
<hr/>	
Pengarah Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	
<hr/>	
Penanggung Jawab Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si	
<hr/>	
Penyunting Agus Sumantri, S.Sos	
<hr/>	
Pelaksana Dra. Ria Satiti Irawati Imam Santoso, SE	
<hr/>	
Anggota Alice Raga Dewi, S.Sos Ir. Rusman Fajar Rahman, M.S.Ikom Kurniawatisari, S.Sos	
<hr/>	
Distribusi Makmur	
<hr/>	
Narasumber Pejabat Kehumasan unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian	

Kinerja Mentan Dapat Apresiasi Dari Presiden

"Presiden memberi apresiasi terhadap kinerja Menteri Pertanian, karena Presiden menilai Menteri Pertanian mampu mengendalikan kenaikan harga komoditas pangan terutama harga bawang merah. Apalagi saat momentum Ramadan dan Lebaran, Menteri Pertanian sangat berperan dalam mengendalikan harga-harga komoditas pangan"



Widodo di sela acara berbuka puasa bersama di Istana Negara Jakarta (8/7).

Dalam acara tersebut turut hadir Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara dan Menkominfo. Sementara itu, para pemimpin redaksi dan pimpinan media yang hadir itu antara lain Pemred SCTV-Indosiar, Pemred Liputan6.com, Pemred Kompas, dan Pemred Metro TV serta sekitar 183 orang pengelola media dan setidaknya 35 perwakilan Forum Pemred.

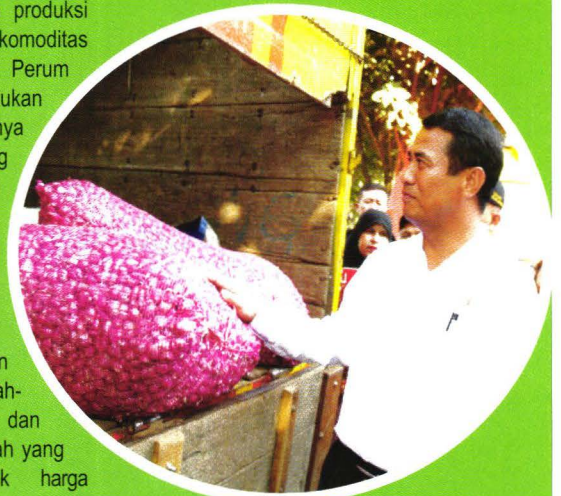
Dihadapan yang hadir, Presiden mengungkapkan bahwa Mentan kerap mengadakan sidak ke pasar-pasar di Jabodetabek untuk memantau ketat harga bawang merah. Tidak hanya itu Mentan datang langsung ke sentra-sentra produksi untuk memanen langsung komoditas tersebut. Mentan pun mengajak Perum Bulog untuk dapat segera melakukan penyerapan dan memasarkannya langsung di daerah-daerah yang harga bawang merahnya berpotensi mengalami kenaikan.

"Untuk mencegah kenaikan harga bawang merah maka sejak awal Juli 2015 Mentan telah turun tangan langsung dengan memastikan produksi bawang merah di daerah-daerah sentra produksi dan memboyongnya langsung ke wilayah yang dianggap berpotensi bergejolak harga pangannya.

Sebagai Menteri seharusnya memang seperti itu, harus mengerti urusan di lapangan sehingga target yang diberikan ke provinsi akan jelas terbukti" ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengharapkan komoditi pangan yang diimpor selama ini harus dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Selanjutnya, penghentian impor juga diharapkan untuk komoditas gula, kedelai dan jagung. Presiden memperkirakan, apabila impor pangan dihentikan maka Pemerintah Indonesia dapat menghemat sekitar Rp 300 triliun-Rp 320 triliun.

"Selama ini untuk menutupi kekurangan stok beras dalam negeri, Pemerintah Indonesia terpaksa melakukan impor beras, sehingga ke depannya diharapkan kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dari produksi beras sendiri. Sejak Oktober 2014 hingga Juli 2015 kita bisa menahan untuk tidak impor. Meski pada Januari ada gejolak. Akan tetapi kita berani, namun, ini tidak bisa langsung dilakukan, karena membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun," harap Presiden.



Dalam upaya penanganan kenaikan harga bawang merah, Menteri Pertanian telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk berkomunikasi dengan para petani bawang dan mendorong hasil panen petani untuk didistribusikan dan dipasarkan ke daerah-daerah yang dianggap rawan bergejolak harga pangannya. Cara kerja Menteri Pertanian tersebut ternyata mendapat apresiasi dari Presiden RI.

"Saya menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang saya nilai mampu mengendalikan kenaikan harga komoditas pangan terutama harga bawang merah. Mentan sangat berperan dalam mengendalikan harga-harga komoditas pangan saat momentum Ramadan dan Lebaran" kata Presiden Joko



Kementan Beri Apresiasi Keberhasilan Swasembada Pangan Di Sulsel

"Di tengah program swasembada pangan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah, Provinsi Sulawesi Selatan mampu tetap menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu provinsi yang menyuplai kebutuhan beras provinsi lain. Sebagai bentuk apresiasi, Sulawesi Selatan pada tahun depan akan mendapat anggaran lebih tinggi lagi"

Kementerian Pertanian memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berhasil swasembada pangan. Keberhasilan dalam melakukan swasembada pangan telah menyelamatkan Indonesia dari import beras. Pasalnya Sulsel mampu memasok beras untuk kebutuhan nasional. Menteri Pertanian menilai bahwa program swasembada pangan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah kedepannya akan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia untuk impor beras.

"Kami berterima kasih karena Provinsi Sulawesi Selatan mampu tetap menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu provinsi yang menyuplai kebutuhan beras provinsi lain, saya berharap swasembada pangan Sulawesi Selatan untuk waktu mendatang nantinya terus meningkat" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di sela-sela acara pengiriman beras produksi Sulawesi Selatan ke 11 provinsi di Terminal Petikemas Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar (14/7).

Sebelas provinsi yang akan menerima beras dari provinsi Sulawesi Selatan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Utara,



Nanggroe Aceh Darussalam. Pada pengiriman beras antar pulau yang kedua itu, Sulsel mengirim 44 kontainer dengan total muatan 1.056 ton beras. Badan Urusan Logistik (Bulog) sendiri telah menandatangani kontrak penyerapan hingga 55 ribu ton dengan PT Pelitagro, perusahaan Sulsel yang bertindak sebagai penyedia.

Menurut Mentan saat sekarang peningkatan hasil produksi beras nasional mencapai rekor tertinggi, yakni meningkat 5,5 juta ton beras, sesuai data Badan Pusat Statistik. Hal tersebut tidak lepas pula dari suplai beras dari Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional yang ikut menyuplai daerah lainnya. Mentan menjanjikan akan meningkatkan anggaran pertanian untuk provinsi tersebut pada tahun 2016.

"Tahun ini Sulawesi Selatan mendapat anggaran Rp 4 triliun, tahun depan anggarannya akan lebih tinggi lagi, saya berharap provinsi lain menjadikan apa yang dilakukan Sulsel ini sebagai contoh, sehingga jika seluruh provinsi lakukan hal serupa maka impor dapat dihentikan. Kalau seluruh provinsi melakukan hal serupa beras maka kita tidak perlu impor beras." ujar Mentan.

Sebelumnya dalam Rakor Swasembada Pangan dan Percepatan Realisasi Anggaran 2015 se-Sulawesi, Mentan juga mengungkapkan pencapaian peningkatan produktivitas pangan merupakan hasil kerja keras pihaknya melalui pelaksanaan empat regulasi. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka produksi padi pada 2015 akan meningkat



6,64 persen menjadi sebesar 75,55 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada kabar gembira bahwa BPS menyebut ada angka ramalan (ARAM) yang meningkat 5,5 juta ton. Mudah-mudahan ini jadi kenyataan, angka tetap, Pencapaian lainnya adalah peningkatan luas tambah tanam sebanyak 400 ribu hektare (ha). Kemudian, terbangunnya irigasi sebanyak 1 juta irigasi. Serta bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang hingga kini mencapai 40 ribu unit. Pencapaian ini membutuhkan kerja keras dengan peraturan kebijakan,” ungkap Mentan.

Mentan memaparkan Kebijakan pertama adalah dengan meniadakan tender menjadi penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan pertanian seperti benih, pupuk, alsintan dan yang lainnya. Menurut dia, proses tender memerlukan waktu yang cukup lama sehingga membuat pertanian bakal bekerja lambat, padahal pertanian merupakan tanaman semusim yang tak akan bisa menunggu proses tender itu sendiri.

“Tanaman pangan itu dalam 110 hari sudah bisa panen, sedang proses tendernya itu jugabutuh lama, bahkan baru keluar dalam tujuh bulan. Kami ubah regulasi dengan penunjukan langsung sehingga kita bergerak cepat. Biasanya alsintan setahun cuma tersedia hanya 2.000 unit, itu pun masih terdapat kesulitan. Tapi sekarang sudah 40 ribu dan kita target 60 ribu unit,” papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan regulasi kedua adalah dengan mendorong daerah untuk tidak menanam pangan di areal existing yaitu area yang sudah ditanam dan regulasi ketiga, meningkatkan anggaran pertanian daerah agar mampu meningkatkan produksi pertanian yang ada di daerah. Sedangkan terakhir adalah dengan melibatkan semua stakeholder dalam produktivitas pangan. Stakeholder

itu terdiri dari Badan Urusan Logistik (Bulog), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan petani itu sendiri.

“Pelibatan semua stakeholder ini dilakukan agar proses produksi dari petani hingga penyaluran distribusi hasil pertanian dapat mengamankan pasokan pangan dalam negeri sehingga tak membutuhkan impor. Angka yang dikeluarkan BPS berasal dari kerja keras kita selama ini. Pencapaian ini akan terus kami tingkatkan agar swasembada pangan dapat terealisasi,” terang Mentan.

Mentan mengungkapkan, Kementan juga



akan terus melaksanakan arahan Presiden dalam meningkatkan produktivitas pertanian demi menghentikan impor pangan. Salah satunya adalah dengan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan irigasi pertanian untuk distribusi air ke sawah-sawah petani. Presiden telah menargetkan pembangunan irigasi untuk tahun 2015 sebanyak satu juta irigasi. Sampai saat sekarang, jumlah irigasi yang berhasil dibangun ada sebanyak 1,17 juta irigasi. Melembi

target yang dicanangkan Presiden.

“Sekarang sudah sudah ada 1,17 juta sudah terpenuhi target irigasi sejak Mei, tercapainya target pembangunan irigasi sebanyak satu juta tersebut tidak berhenti sampai di situ. Untuk target tahun ini akan ditingkatkan menjadi dua juta pembangunan irigasi. Irigasi sudah selesai satu juta dan kita target dua juta irigasi selesai tahun ini. Ini tidak pernah terjadi dua juta dalam setahun. Ini untuk merebut kehilangan produksi pertanian kita yang selama ini terjadi,” ungkap Mentan.

Terkait dengan kondisi dimana sering sekali komoditi-komoditi pertanian, seperti beras, cabe, bawang dan kebutuhan pokok sering mengalami anomali harga akibat permainan di pasar, baik oleh pengecer maupun pedagang sehingga terkadang harga melonjak naik, maka Mentan berencana akan membentuk 5000 toko tani di seluruh wilayah Indonesia mengingat produksi yang ada di daerah asalnya walaupun komoditi pertanian melimpah, namun di pasaran harganya sering kali naik.

“Nantinya toko tani murah ini anggarannya akan dimasukkan dalam dana yang telah disetujui Presiden untuk penambahan modal Bulog sebesar Rp 3 Triliun, Anggaran tambahan ini nantinya

akan digunakan oleh Bulog dalam menyerap kebutuhan pokok seperti cabai, daging, bawang, beras dan jagung. Yang mana nantinya ini akan dipasok dan dipasarkan melalui toko tani murah. Sehingga dapat menstabilkan harga di pasaran saat harga melonjak” terang Mentan.



Lewat Momentum Halal Bi Halal

Mentan Apresiasi Kinerja PNS Lingkup Kementan

“Untuk pertama kali terjadi produksi padi, jagung, kedelai, dan empat komoditas utama lainnya semua meningkat selama 9 bulan selama kepemimpinannya di Kementan. Mentan mengakui peningkatan produksi padi, penambahan luas area tanam, dan apresiasi dari anggota DPR merupakan hasil kerja keras pegawai Kementan”

Dengan adanya pengumuman dari Badan Pusat Statistik tentang peningkatan produksi terhadap tujuh komoditas strategis seperti padi, jagung dan kedelai maka melalui momentum acara Halal bi Halal, Menteri Pertanian menyampaikan apresiasi atas kinerja semua Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Pertanian selama sembilan bulan dirinya menjabat dan bekerja sebagai Menteri Pertanian dan ternyata menunjukkan pencapaian yang mengembirakan. Atas prestasi tersebut Kementerian Pertanian juga mendapat plakat penghargaan dari Komisi IV DPR.

“Terkait laporan BPS, untuk pertama kali terjadi produksi padi, jagung, kedelai, dan empat komoditas utama lainnya semua meningkat, Ini adalah hasil kerja keras pegawai Kementan. Karena mampu meningkatkan produksi komoditas pangan Kementan telah mendapatkan plakat dari Komisi IV DPR. Peningkatan produksi ini merupakan kerja keras kita selama sembilan bulan terakhir, semoga hasil ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di sela acara Halal Bi Halal di Kampus Kementan (23/7).

Dihadapan sekitar 500 orang pegawai Kementan yang hadir, Mentan menuturkan bahwa masih banyak pihak-pihak yang

meragukan pencapaian selama 9 bulan selama kepemimpinannya di Kementan, seperti peningkatan produksi padi, penambahan luas area tanam, dan apresiasi dari anggota DPR.

“Beberapa pihak yang meragukan dan mengatakan bahwa mereka ragu dengan capaian tersebut yang tertera dari data BPS. Padahal jika data BPS yang sudah puluhan tahun menangani data di Indonesia saja diragukan, maka mana ada lembaga lain punya data yang bisa dipercaya,” tutur Mentan.

Mentan juga menerangkan pencapaian tersebut karena kerja sama yang dibangun antar sektor dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia, Badan Urusan Logistik dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga tidak ada egoisme untuk membangun bangsa.

Mengingat upaya membangun bangsa perlu didukung dengan menghilangkan egoisme sektoral yang akan mendorong peningkatan kinerja kementerian. Untuk itu Mentan berharap seluruh pegawai Kementan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan kinerja serta membangun komunikasi antar pemangku kepentingan.

“Kami harap seluruh Kementerian Pertanian untuk memperkuat silaturahmi dan menghilangkan egoisme sektoral dalam setiap saat, kapan saja. Kita harus membangun komunikasi kepada seluruh

pihak khususnya ‘stakeholder’ pemangku kepentingan sehingga Kementerian Pertanian ke depan bisa berjaya,” harap Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementan untuk ikut serta dalam lelang yang akan diadakan karena ke depan Mentan ingin mencari para pejabat khusus yang merupakan pegawai terbaik di Kementerian Pertanian yang mau membawa pertanian lebih baik.

“Saya ingin Kementerian Pertanian ke depan akan semakin baik karena berisikan pejabat-pejabat terbaik dalam lingkungan kementerian melalui lelang jabatan. Selain itu pentingnya kesabaran dan ketegasan dalam bekerja. Kita harus tegas dan tidak boleh kita kompromi dengan yang ingin merusak Kementerian Pertanian,” ujar Mentan

Kepada pihak Media Massa yang hadir, Mentan mengklarifikasi pemberitaan yang menginformasikan bahwa terdapat impor beras melonjak sebanyak 130%. Informasi tersebut bersifat hiperbola, dikarenakan berita yang mencantumkan kuantitas impor beras sebanyak 49 ribu ton sesungguhnya merupakan jumlah yang tidak lebih dari pengadaan untuk dua hari yang dilakukan oleh Bulog. Ditegaskan oleh Mentan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan izin impor beras konsumsi tahun 2015. Pasalnya, produksi beras dalam negeri dinilai sudah mencukupi target.

Sedangkan beras yang diimpor pada Juni 2015 merupakan beras jenis khusus, bukan yang biasa dikonsumsi masyarakat atau beras medium. Impor beras tersebut adalah impor beras menir yang digunakan untuk kebutuhan industri dan beras khusus penderita diabetes. Kegiatan impor beras medium biasanya hanya dilakukan oleh Perum Bulog dengan penugasan pemerintah.

“Kalaupun Kementerian Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor beras hal itu dikarenakan ada restoran yang membutuhkan jenis beras tertentu yang memang harus diimpor. Jumlahnya sangat sedikit, dari data impor beras jumlahnya sekitar 49 ribu ton yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jenis beras menir untuk industri dan beras khusus untuk penderita diabetes, serta untuk restoran. Dibandingkan dengan produksi beras nasional tahun 2015 yang 45 juta ton, maka impor beras itu hanya sebesar 0.1 persen saja. Dengan jumlah impor beras sekecil itu maka tidak akan mempengaruhi harga beras petani dan cadangan beras pengadaan Bulog beras

dalam negeri. Kemampuan Bulog menyerap beras petani 25 ribu ton per hari sehingga saat ini belum diperlukan impor beras untuk kebutuhan pangan nasional.” tegas Mentan.

Terkait ekspor beras, Mentan menyatakan rencana pemerintah untuk melakukan ekspor beras organik ke Arab Saudi pada tahun 2016. Beras organik yang dimaksud adalah beras hasil produksi petani di Merauke, Papua. Saat kunjungan kerjanya ke Propinsi Papua, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mendorong pembangunan ekonomi di kawasan wilayah Indonesia Timur. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi lahan yang menganggur seluas 4,6 juta hektar di Merauke.

Di Merauke akan dikembangkan sebagai sentra produksi pangan mulai dari padi, jagung, dan tebu. Dari 4,6 juta hektar tersebut, 1,2 juta hektar bisa dipakai untuk padi, jagung, dan tebu. Kalau semua lahan 4,6 juta bisa dikerjakan semua, hasilnya 1 hektar bisa 8 ton padi. Artinya hasilnya bisa 37 juta ton sekali panen, tiga kali panen

110 juta ton. Jadi hanya satu kabupaten bisa memenuhi produksi nasional yang sekarang mencapai 60-70 juta ton. Saat sekarang telah dilakukan pembukaan lahan untuk dijadikan sawah di Merauke yang diharapkan selesai dalam waktu empat bulan mendatang.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4,6 juta hektar di Merauke, Provinsi Papua. Salah satunya untuk dikembangkan sebagai sentra lumbung padi. Saat ini 1,2 juta hektar sudah ditanami padi dan tidak lama lagi, Merauke akan mengekspor beras organik ke Mesir Hingga Arab Saudi. Beras organik produksi dari Merauke sudah tanam, kita tunggu hasilnya 4 bulan lagi panen. Saya optimistis, panen akan berhasil dan produksi beras dari Merauke akan berlimpah hingga bisa diekspor. Anggaran sudah cair, paling tidak tahun depan kita sudah bisa ekspor. Tahun depan kita mulai ekspor beras organik ke Mesir, Saudi Arabia. Sudah ada permintaan dari sana beberapa waktu lalu,” kata Mentan.

Pejabat Tinggi Madya Punya Peran Strategis Untuk Capai Target Swasembada



“Saat Kementan sedang melaksanakan tugas besar dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan maka peran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menjadi sangat penting dan strategis karena tugas tersebut membutuhkan leadership yang tangguh dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di setiap unit eselon I untuk menggerakkan sumberdaya dalam rangka mencapai target swasembada pangan yang telah dicanangkan”

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100 /M Tahun 2015, Menteri Pertanian melantik 4 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang terdiri Kepala Badan Ketahanan Pangan, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi, Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional dan Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian. Keempat pejabat tersebut adalah pegawai yang terpilih dari hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Madya Kementerian Pertanian Tahun 2015.

“Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini menjadi sangat penting dan strategis pada saat kita sedang melaksanakan tugas-

tugas besar dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan. Tugas-tugas tersebut membutuhkan leadership yang tangguh dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di setiap unit eselon I untuk menggerakkan sumberdaya dalam rangka mencapai target swasembada pangan yang telah kita canangkan” kata Menteri Pertanian dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat Eselon I di Kampus Kementan (3/7).

Mentan mengungkapkan selama delapan bulan telah bekerja keras melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan dan peningkatan produksi komoditas strategi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi / kerbau

dan gula. Sebagai dampak dari program UPSUS, berbagai kemajuan telah dicapai dalam 8 bulan terakhir. Kemajuan yang sangat signifikan antara lain adalah meningkatnya realisasi luas tambah tanam sebesar 369,9 ribu ha, produksi padi meningkat 2,6 juta ton GKG dari 41,3 juta ton GKG pada Oktober 2013-Maret 2014 menjadi 43,9 juta ton GKG pada Oktober 2014 - Maret 2015.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa peningkatan realisasi luas tambah tanam dan produksi padi tersebut sebagai dampak program dan kegiatan UPSUS yang meliputi realisasi penyaluran pupuk pada periode Oktober 2014 - Maret 2015 mencapai lebih dari 26,4 juta ton (5,97%), meningkat sebanyak 264,6 ribu ton dibanding periode yang sama tahun lalu, realisasi perbaikan jaringan irigasi tersier lebih dari 1 juta ha (67,89%), realisasi optimasi lahan 294 ribu ha (58,77%), (4) serta realisasi bantuan traktor lebih dari 26 ribu unit (78,14%).

Dari hasil kunjungan kerjanya di berbagai provinsi dan kabupaten, Mentan merasa yakin bahwa program UPSUS Swasembada Pangan yang telah dilaksanakan turut mendorong peningkatan produksi padi nasional. Berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) BPS tahun 2015, produksi padi nasional mencapai 75,55 juta ton GKG, meningkat 6,64% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Untuk itu Mentan mengajak seluruh jajaran

untuk terus melanjutkan upaya ini hingga terwujud angka tetap (ATAP) yang bagus.

“Saat ini kita menghadapi musim kemarau dan kejadian kekeringan di beberapa sentra produksi padi. Kita harus segera melakukan upaya antisipatif dan penanggulangan kekeringan, sehingga sejak dini kita bisa mengurangi resiko kekeringan dan gagal panen. Kinerja produksi pangan yang sudah kita capai hingga saat ini harus terus kita pertahankan bahkan kita tingkatkan. Kepada pejabat yang baru dilantik, Saya berharap Saudara sekalian segera berkonsolidasi dan menggerakkan sinergi dan kerjasama sesuai dengan jabatan yang Saudara emban” ujar Mentan.

Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan yang baru, Mentan memerintahkan agar segera melakukan upaya khusus dan langkah nyata untuk mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan yang tetap terjaga, distribusi yang berimbang, dan berperan aktif menjaga kestabilan harga pangan nasional. Sedangkan kepada para Staf Ahli Menteri, Mentan meminta segera melakukan kerjasama

dengan unit kerja teknis maupun lembaga terkait dan mengidentifikasi kebutuhan kebijakan, utamanya terkait UPSUS Swasembada Pangan dan kebijakan lain sesuai tugasnya masing-masing.

Adapun keempat pejabat Eselon I yang baru dilantik adalah Garjita Budi sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan, Syukur Iwantoro sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Hasanuddin Ibrahim sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, dan Ani Andayani sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian.



Untuk Capai Target Swasembada Pangan Kementan Butuh Pejabat Berkualitas

“Kementerian Pertanian harus selalu dinamis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan. Tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan membutuhkan pejabat yang pekerja keras, memiliki komitmen tinggi, mempunyai leadership yang tangguh dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di setiap unit kerja Kementerian Pertanian”

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/KP.230/7/2015, Menteri Pertanian melantik 6 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian. Keenam pejabat tersebut adalah pegawai yang telah terpilih dari hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2015. Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian harus selalu dinamis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas

besar percepatan pencapaian swasembada pangan.

“Untuk mencapai target swasembada pangan yang telah kita canangkan, kita tidak mungkin mencapai sasaran dengan pejabat yang cara bekerja yang biasa-biasa saja dalam menggerakkan sumberdaya. Tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan membutuhkan pejabat yang pekerja keras, memiliki komitmen tinggi, mempunyai leadership yang tangguh dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di setiap unit kerja” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat acara Pelantikan Eselon II di Kampus Kementan (13/7).

Mentan mengungkapkan rasa syukur karena selama hampir sembilan bulan jajaran Kementan telah bekerja keras melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan dan peningkatan produksi komoditas strategi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi / kerbau dan gula. Ternyata kinerja Kementan tersebut telah mengindikasikan keberhasilannya, ditunjukkan pasokan pangan cukup stabil dengan tidak mengimpor, hambatan distribusi dan permainan perdagangan dapat diredam.

“Semua itu tidak dapat kita lakukan apabila kita bekerja biasa-biasa saja. Dari perkembangan kegiatan kunjungan yang Saya lakukan di berbagai provinsi dan kabupaten, kita meyakini bahwa program UPSUS Swasembada Pangan turut mendorong capaian kinerja produksi tahun 2015 sesuai dengan Angka Ramalan (ARAM I) BPS tahun 2015. Upaya tersebut dalam beberapa kesempatan juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden” ungkap Mentan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Mentan berharap agar segera berkonsolidasi dengan jajaran instansi terkait dan menggerakkan sumberdaya di Unit Kerja yang dipimpin mengingat tantangan kedepan masih cukup berat. Untuk mengatasi perlu perjuangan dan kerja keras semua pihak.

“Tantangan itu antara lain kekeringan di beberapa daerah, hambatan distribusi komoditi, dan situasi ekonomi dunia dan nasional yang belum kondusif. Angka Ramalan BPS akan dapat kita raih apabila semester depan kita mampu atasi tantangan tersebut” harap Mentan.

Lebih lanjut Mentan meminta Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, agar segera



berkoordinasi dengan seluruh staf dan para Direktur di lingkungan Ditjen Tanaman Pangan mengawal berbagai kegiatan strategis dan segera selesaikan semua hambatan serapan anggaran serta perbaiki perencanaan pembangunan tanaman pangan ke depan.

Kepada Direktur Perlindungan Perkebunan, Mentan memerintahkan segera menetapkan langkah aksi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim untuk perlindungan tanaman perkebunan, khususnya mendukung UPSUS Peningkatan Produksi Gula dan Kakao. Lakukan koordinasi dalam rangka antisipasi kebakaran perkebunan di daerah rawan kebakaran.

Mentan juga memerintahkan Direktur Pupuk dan Pestisida, agar segera menetapkan kembali kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2016 dengan melakukan penyempurnaan pola distribusi pupuk dengan sistim kartu subsidi berkoordinasi dengan lembaga/ instansi terkait, dengan target ketersediaan pupuk secara 6 tepat mampu mendukung UPSUS Swasembada Pangan. Diharapkan segera tuntaskan permasalahan distribusi dan kurang bayar pupuk bersubsidi.

Kepada Kepala Pusat Data dan Sistem informasi Pertanian, Mentan mengingatkan agar segera menetapkan langkah aksi untuk memperbaiki sistem dan mempercepat delay data dan sistem informasi pertanian dari lapangan. Atasi perbedaan data antar unit kerja dan BPS. Tingkatkan kualitas dan validitas data dan informasi pertanian. Hal itu perlu dibangun sistem data satu pintu dengan kualitas kontrol yang baik. Sedangkan

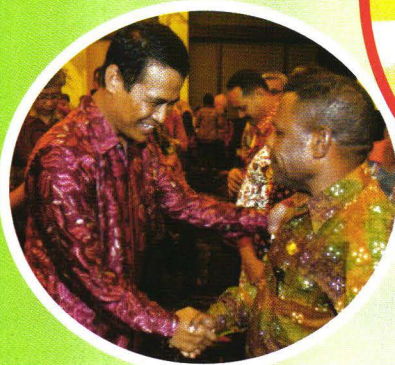
untuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Mentan menghimbau agar menyiapkan rekomendasi teknologi yang menjawab permasalahan petani pekebun. Percepat transfer inovasi teknologi perkebunan mendukung UPSUS Peningkatan Produksi Gula dan Kakao serta komoditi strategis lainnya.

Sedangkan untuk Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Mentan menganjurkan agar menata kembali dan perkuat program penguatan kapasitas manajemen sumberdaya manusia pertanian mendukung percepatan swasembada pangan. Pusat PMKP jangan hanya menjual fasilitas akomodasi dan konsumsi, tetapi mengambil peran dalam mengatasi kelemahan manajemen pembangunan pertanian.

Adapun ke enam pejabat Eselon II yang dilantik adalah Dr. Ir. Muhrizal, M.Sc sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc sebagai Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Ir. Laurensius Sihaloho, MBA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Ir. Suwandi, M.Si sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal, Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan.

Perlunya Sinergi Semua Pihak Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

“Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan serta gizi perlu dikerjakan dengan sangat baik dan tersinergi sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi bangsa, khususnya dalam pembangunan kedaulatan pangan. Target swasembada akan tercapai, kalau semua pihak saling bersinergi, sinkronisasi, ikhlas bekerja untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat”



Sebagai upaya sinkronisasi kebijakan dan program ketahanan pangan di tingkat pusat dengan daerah, Dewan Ketahanan Pangan menyelenggarakan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan. Pelaksanaan Sidang Regional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dimana forum konsultasi dan koordinasi pangan dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun. Sidang Regional tersebut sebelumnya dibuka oleh Sekjen Kementan dan ditutup oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pada tanggal 3 Juli 2015 di Bogor.

Dalam dialognya dengan peserta Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 2015, Mentan menyampaikan bahwa pembangunan pertanian dan ketahanan pangan serta gizi perlu dikerjakan dengan sangat baik dan tersinergi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masa depan generasi bangsa, khususnya dalam pembangunan kedaulatan pangan.

Dihadapan para peserta Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan, Mentan juga memaparkan apa saja yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian dan permasalahan dalam pertanian. Ada lima persoalan dalam pertanian yang sedang fokus dibenahi oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada yakni persoalan lahan, irigasi, alat mesin pertanian, distribusi pupuk dan ketersediaan benih unggul.

“Target swasembada ini akan tercapai, kalau semua pihak saling bersinergi, sinkronisasi, ikhlas bekerja untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat, untuk itu saya ingatkan pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia dapat memenuhi target produksi

pertanian sebesar 30 persen sehingga

tidak termasuk dalam 26 pemerintah kabupaten yang mendapat peringatan karena tidak mencapai target” kata Mentan.

Mentan mengungkapkan, saat sekarang sudah ada 26 pemerintah kabupaten yang mendapat rapor merah karena tidak mampu memenuhi target produksi pertanian. Jika 26 kabupaten tersebut tidak mampu meningkatkan produksinya, mereka terancam akan dicabut dana bantuan dari Kementan tahun depan. Masih ada waktu sampai September hingga Oktober bagi pemerintah daerah mengejar keteringgalan target produksi.

“Evaluasi akan dilakukan Kementerian Pertanian di bulan tersebut. Kalau tidak mencapai target, Kementerian Pertanian tidak akan memberikan anggaran untuk tahun depan, tapi jika daerah itu mampu meningkatkan produksi melebihi target 30 persen, maka kami akan menambah anggarannya. Bagi daerah yang tidak memenuhi target maka sanksi akan berlaku tahun depan,” ungkap Mentan.

Terkait masalah kekeringan, Mentan menyatakan optimistis kekeringan yang melanda lahan pertanian di sejumlah wilayah di Indonesia tidak akan mengganggu target swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tiga tahun. Dengan luas tambah tanam 400 ribu hektar tersebut target swasembada pangan masih aman dan dapat dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang.

“Insya Allah, walaupun terdapat kekeringan, ternyata masih ada tanda-tanda baik, karena penambahan luas tanam kita kurang lebih 400 ribu hektar. Dampak kekeringan dengan elnino kemungkinan terkena 25 ribu sampai 30 ribu hektar yang puso. Berarti itu masih relatif aman, karena masih surplus 400 ribu hektar,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa untuk menghadapi kekeringan yang terjadi di daerah-daerah, Kementerian Pertanian melakukan antisipasi sejak awal Januari sampai dengan saat sekarang. Langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian yakni membangun irigasi tersier, membangun embung, membagikan pompa air, kemudian membagikan alat mesin pertanian dan lainnya supaya mempercepat tanam dan panen.

“Di seluruh Indonesia terdapat wilayah endemis kekeringan setiap tahunnya kurang lebih 200 ribu hektar, jadi untuk dapat melakukan proses tanam lebih cepat maka harus menggunakan mesin rice transplanter, karena diperlirakan panen lebih cepat menggunakan mini combine harvester, dibanding kalau cara manual,” jelas Mentan.

Mentan juga memaparkan pihak Kementan sudah keliling ke lima provinsi yang dilanda kekeringan diantaranya Bojonegoro, Jawa Timur, ada 10 ribu hektar lahan pertanian terkena kekeringan. Selanjutnya, kekeringan di Jawa Tengah meliputi daerah Pati, Demak dan Grobogan. Kementan memberikan pompa untuk masing-masing daerah agar bisa mengalirkan air yang ada di sungai dan embung-embung.

“Di Bojonegoro kami langsung memberikan 300 unit pompa air, yang saat ini sudah tiba dan kami minta lahan itu diselamatkan semua, di Jawa Barat, kami mengunjungi daerah Cirebon dan Indramayu. Sama seperti daerah sebelumnya, Kementan kembali membagikan pompa untuk menyalurkan air dari sungai. Di Jawa Barat ada 11 ribu hektar yang terancam kekeringan apabila tidak ada tindakan. Tapi, kami sudah lakukan langkah penyelamatan dengan mendistribusikan pompa air,” papar Mentan.

Menteri mengingatkan, daerah paling kritis mengalami kekeringan adalah wilayah Indramayu. Tetapi masih bisa diselamatkan, tetapi Mentan menghimbau agar masyarakat tidak mengartikan terancam kekeringan itu sebagai Puso. Puso seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 25 ribu hektar setiap tahun. Diusahakan tahun 2015 rendah karena sebelumnya ada persiapan lebih awal.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Mai Rokhyat menjelaskan dari pelaksanaan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan telah dirumuskan kesepakatan bersama bupati dan wali kota sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam pembangunan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan nasional di daerah khususnya terkait dengan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. "Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan tahun ini menghasilkan komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan pertanian, perikanan dan peternakan, juga untuk pengembangan dan peningkatan gizi serta kegiatan P2KP. Selain itu bagaimana cara memperkuat daya saing di wilayah Timur, dan memperkuat lembaga ketahanan pangan," kata Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Dari pembahasan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 2015 yang bertemakan Mewujudkan Swasembada Pangan Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Serta Menghadapi Persaingan Pasar Global dihasilkan beberapa poin mengenai (1) pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di daerah dalam mewujudkan ketersediaan pangan perlu

didukung oleh pemerintah pusat, (2) pembangunan infrastruktur dan kemudahan perizinan dilakukan sebagai upaya penguatan dalam aspek keterjangkauan pangan, serta (3) peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pangan dalam menghadapi MEA dan pemenuhan gizi konsumsi pangan.

Disamping itu, pembahasan terkait dengan pembentukan kelembagaan pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi isu sentral dalam Sireg DKP 2015. Selanjutnya hasil dari Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 2015 akan menjadi bahan perumusan kebijakan pada forum para Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi di Konferensi DKP mendatang.



Produksi Padi Nasional Meningkat Swasembada Pangan Dapat Terwujud

"Produksi padi nasional selama kurun 2015 diprediksi meningkat hingga kisaran 5,5 juta ton, dari tahun 2014 dari 70 juta ton menjadi 75,5 juta ton. Kenaikan itu fantastis dan menjadi rekor tersendiri selama 10 tahun terakhir, sebab selama satu dasawarsa itu, volume produksi padi nasional cenderung fluktuatif. Dengan pencapaian produksi padi yang surplus tersebut, target swasembada pangan nasional bisa terwujud"

Dalam rangka memotivasi serta mendorong petani maupun stakeholder serta aparat di daerah agar lebih giat dan bersemangat dalam memacu peningkatan produksi tanaman pangan sesuai harapan dan target yang dicanangkan, Pemerintah RI melakukan berbagai macam upaya salah satunya adalah penanaman Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai. Kementerian Pertanian sangat menghargai acara panen raya padi dan penanaman tanam kedelai yang digerakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur apalagi



Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang produksi komoditas tanaman pangan terbesar Nasional.

“Di Jawa Timur pencapaian produksi padi pada tahun 2015 sebesar 12,78 juta ton mengalami peningkatan 3,08% atau 381 ribu ton terhadap Angka Tetap (ATAP) 2014. Sedangkan produksi kedelai tahun 2015 sebesar 345 ribu ton mengalami penurunan sebesar 2,75% atau menurun sebesar 9.781 ton terhadap Angka Tetap (ATAP) 2014, namun berdasarkan kontribusinya, Provinsi Jatim menyumbang produksi sebesar 34,61% terhadap produksi kedelai nasional” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di sela acara panen raya padi hibrida di Desa Masaran Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur (29/7).

Dengan adanya panen padi hibrida dengan varietas Sembada yang ditanam dengan sistem jajar legowo SRI, Mentan memuji kesuksesan para petani dalam mengembangkan padi hibrida sehingga menghasilkan beras premium dengan volume mencapai 10 ribu ton.

“Ini bagus sekali. Saya berharap keberhasilan petani mengembangkan padi hibrida bisa menular ke daerah-daerah lain sehingga target produksi beras nasional tidak hanya melimpah sebagaimana ditargetkan, tetapi juga berkualitas unggul,” ujar Mentan.

Mentan menuturkan produksi padi nasional selama kurun 2015 diprediksi meningkat hingga kisaran 5,5 juta ton, dari sebelumnya (2014) sekitar 70-an juta ton menjadi 75,5 juta ton. Kenaikan itu fantastis dan menjadi rekor tersendiri selama 10 tahun terakhir, sebab selama satu dasawarsa itu, volume produksi padi nasional cenderung fluktuatif. Dengan pencapaian produksi padi yang surplus tersebut, Mentan optimistis target swasembada pangan nasional selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo bisa terwujud.

“Ini mengacu pada ramalan Badan Pusat Statistik di mana luas lahan pertanian padi tahun ini meningkat dan produksi padi naik drastis, Tahun lalu produksi padi kita turun sekitar satu juta ton. Sedangkan tahun ini, ramalan BPS mengatakan terjadi kenaikan produksi hingga kisaran 5,5 juta ton. Target swasembada selama tiga tahun yang dicanangkan pemerintah tidak akan berubah. Malah dengan indikator peningkatan produksi selama 10 bulan terakhir, kami berharap swasembada pangan bisa dipercepat,” tutur Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa peningkatan produksi padi tersebut salah satunya dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya turunnya jumlah



serangan hama, berkurangnya lahan yang

mengalami kekeringan serta menurunnya lahan yang terdampak banjir. Dengan tingginya produksifitas padi nasional tersebut, maka dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah dapat ditekan. Sedangkan untuk meminimalisir dampak kekeringan, Kementan telah membangun dan memperbaiki saluran irigasi primer hingga tersier yang menjadi pemasok air di 1,3 juta area persawahan.

“Kementerian Pertanian juga menggelontorkan bantuan 40 ribu traktor tangan dan pompa air serta membentuk tim khusus untuk mengendalikan meluasnya bencana kekeringan sebagai dampak elnino yang terjadi sejak Maret dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober-November. Kami sudah membentuk tim khusus pengendalian kekeringan agar bencana yang terjadi sebagai dampak kemarau dan elnino ini tidak terlalu mempengaruhi target produksi padi maupun komoditas pertanian lain,” jelas Mentan.

Mentan memaparkan tugas tim khusus yang memiliki postur organisasi bertingkat mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat itu adalah melakukan pemantauan terhadap potensi dan peristiwa kekeringan di daerah masing-masing. Begitu mulai terjadi kekeringan yang berimbas ke areal pertanian ataupun perkebunan, petugas anggota tim khusus tersebut wajib membuat laporan berikut analisis untuk selanjutnya dilaporkan ke timsus pusat di Kementerian Pertanian. Timsus harus segera melapor sehingga penanganan dan pencegahan dampak lanjutan bisa dilakukan dengan cepat dan efektif,

“Seperti kasus di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di daerah yang berada di pedalaman kawasan pantai utara (pantura) tersebut sempat teridentifikasi potensi kekeringan seluas 10 ribuan hektare. Timsus yang berada di Bojonegoro kemudian cekatan membuat laporan tertulis ke Kementerian Pertanian, langsung

ke tangan menteri sehingga sejumlah bantuan bisa segera diluncurkan, terutama mesin pompa air. Hasilnya signifikan. Barusan bupati Bojonegoro mengkonfirmasi saya bahwa dari 10 ribuan hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan, hanya sekitar 20 hingga 30 ribuan yang mengalami puso. Itu luar biasa,” papar Mentan.

Mentan mengungkapkan ada enam provinsi yang mendapat pengawasan ketat dari potensi kekeringan, karena diidentifikasi sebagai lumbung pangan nasional. Keenam daerah itu masing-masing adalah Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta Medan Sulawesi Utara. Pemerintah juga telah mengajukan anggaran melalui APBN-P untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan di seluruh wilayah tanah air. Ia mengungkapkan, dana yang sudah diusulkan melalui APBN-P 2015 adalah senilai Rp 800 miliar.

“Terutama Jatim, Jateng dan Jabar ini kami lakukan pengawasan ketat karena perannya yang strategis sebagai lumbung pangan nasional. Selain dialokasikan untuk memperbanyak bantuan pompa air, dana tersebut juga diproyeksikan untuk membiayai pembuatan embung-embung air yang menjadi cadangan pengairan lahan pertanian di musim kemarau. “Insya Allah, kekeringan tahun ini tidak sampai mengganggu target dan produksi pertanian kita,” ungkap Mentan.

Mengingat dukungan dan kerja sama yang intensif dari semua pemangku kepentingan (stakeholder), terutama dari masing-masing pemerintah daerah, TNI AD hingga jajaran babinsa, serta masyarakat petani menjadi faktor penting tercapainya target peningkatan produksi padi/beras nasional tersebut. maka Mentan menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pihak TNI melalui peran Bintara Pembina Desa (Babinsa). Selain itu, tak hanya saling mempererat jalinan kerja sama dengan pihak TNI, dalam perayaan itu, Mentan juga menyaksikan langsung negosiasi antara



petani setempat dengan Perum Bulog, yang siap menyerap hasil panen padi di Trenggalek.

"Sinergi yang dinamis antara pihak kami (Kementan) dengan TNI ini sudah membuahkan hasil yang tergolong baik. Seperti yang dilakukan pihak Babinsa di Munjungan, Trenggalek ini, Tadi saya juga sempat menyaksikan Bulog dengan kelompok tani sudah sepakat harga. Saya

berharap tidak hanya kali ini saja petani sini mau menjual hasil panen padinya ke Bulog, kalau bisa seterusnya demi mewujudkan swasembada pangan nasional, Yang tidak kalah pentingnya adalah memfasilitasi pemasaran hasil, antara lain dengan BULOG, pemanfaatan resi gudang untuk tunda jual," kata Mentan.

Mentan menambahkan, khusus Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015, mendapat

alokasi kegiatan GP-PTT kedelai seluas 4.000 ha, Peningkatan Indeks Pertanian (PAT-PIP) 500 ha, Penambahan Areal Tanam (PAT) jagung 3.000 ha, Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) 4000 ha, optimasi lahan 1.000 ha, traktor roda 2 sejumlah 31 unit, pompa air 21 unit, Combine Harvester kecil 15 unit, corn sheller 4 unit dan power thresher multiguna 7 unit.

Pembangunan Sistem Pengairan Jadi Fokus Pemerintah

"Kementan dan pihak terkait telah bertindak cepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi lahan pertanian, khususnya kekeringan sehingga terjadi penurunan lahan kering. Pembangunan sistem pengairan menjadi fokus Pemerintah RI untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan produksi melalui lahan yang tidur akibat dampak kekeringan. Salah satunya melalui pembangunan sumur dalam yang sangat menunjang pencapaian swasembada beras khususnya pada musim kemarau"



Kementerian Pertanian akan menggenjot pembangunan sistem perairan bagi lahan pertanian di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi lahan kekeringan sekaligus menghidupkan lahan yang tidur ketika musim kemarau tiba. Pembangunan sistem pengairan tersebut penting menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan produksi melalui lahan yang tidur akibat dampak kekeringan. Di kawasan wilayah Indonesia dari luas lahan pertanian sebesar 8,1 juta hektare (ha), 4,8 juta ha merupakan lahan irigasi. Sedangkan 3,3 juta ha merupakan lahan tadah hujan yang mengandalkan air hujan untuk pengairan.

"Karena mengandalkan air hujan untuk pengairan, maka lahan ini selama 6 bulan akan menjadi lahan tidur, dengan begitu petani tidak bekerja dan alsintan ikut tidur selama 6 bulan. Untuk mengatasi hal ini, kami akan menggenjot pembangunan sistem perairan seperti embung, sumur dalam dan sumur dangkal agar saat musim kemarau petani tetap bisa beraktifitas tanpa harus terganggu akibat ketiadaan air. Ini semua bisa jadi solusi bagi pertanian, kalau 3 juta ha tadah hujan dibangun, maka

pertanian kita akan kuat. Kalau ada air maka selesai masalah, ini faktor kunci," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan Kunjungan Kerja ke Sragen Jawa Tengah (27/7).

Ketika mengunjungi area persawahan di Desa Gebang, Sragen, Mentan merasa terkesan dengan kemampuan satu unit sumur dalam yang bisa mengairi lahan pertanian seluas 47 hektare. Pembangunan sumur dalam itu dinilai sangat menunjang pencapaian swasembada beras khususnya pada musim kemarau. Mentan mengapresiasi pembangunan sumur dalam di Desa Gebang yang diprakarsai Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Untuk itu Kementan akan menggulirkan bantuan untuk pembangunan sumur dalam.

Mentan menegaskan pentingnya penanganan kekeringan dan ancaman yang berpotensi menurunkan produksi pangan nasional. Program mendesak yang harus dilakukan adalah pembuatan sumur dangkal, sumur dalam, serta pemberian bantuan pompa air. Langkah tersebut untuk menyelamatkan tanaman pangan yang mengalami kekeringan cukup luas akibat musim kemarau.

"Penanganan kekeringan harus menjadi prioritas sekarang untuk menyelamatkan tanaman pangan dari ancaman kekeringan. Pembangunan sumur dalam itu akan difokuskan di wilayah Jawa Tengah. Saya minta setiap desa yang memiliki potensi sumber mata air melimpah bisa dibangun sumur dalam," tegas Mentan.

Mentan juga menginstruksikan kepada Dinas Pertanian Jawa Tengah untuk memprioritaskan dana dekonsentrasi untuk pembangunan embung, sumur dalam, sumur dangkal, dan pompa air di daerah lain. Mentan juga menjanjikan bantuan sarana produksi pertanian kepada para kelompok tani. Salah satu kelompok tani, Taruna Maju Tani, di desa setempat mendapat bantuan langsung dari Mentan.

"Pembangunan sumur dalam itu akan difokuskan di wilayah Jawa Tengah, saya minta setiap desa yang memiliki potensi sumber mata air melimpah bisa dibangun sumur dalam. Saya berjanji akan memberikan bantuan senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan sumur dalam. Saya juga akan memberi bantuan sarana produksi pertanian kepada para kelompok tani" ujar Mentan.

Setelah meresmikan operasional sumur dalam bantuan pemerintah, Mentan mengajak petani berdialog interaktif. Kunker Mentan tersebut dihadiri sekitar 200 tamu undangan. Beberapa di antaranya, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, 29 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM); jajaran Muspika Masaran dan lain-lain.

Mentan menjelaskan Kementerian Pertanian telah melakukan antisipasi terhadap kekeringan sejak awal tahun 2015 dengan merehabilitasi jaringan irigasi tersier. Total hingga bulan Juli 2015 telah dilakukan rehabilitasi irigasi tersier untuk lahan seluas 1,3 juta ha. Untuk mengantisipasi el nino yang menyebabkan kemarau panjang pada Juni-November 2015, pihak Kementan juga telah menyiapkan tambahan bantuan 20 ribu unit pompa air untuk seluruh Indonesia. Selain itu, dibangun embung-embung, sumur dangkal, dan sumur dalam sebagai sumber air di daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan. Rata-rata setiap tahun terjadi kekeringan seluas 198 - 200 ribu ha. Secara total, Kementan menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk menekan jumlah lahan yang mengalami kekeringan pada tahun 2015.

"Secara nasional terdapat 198 ribu ha daerah endemis kekeringan setiap tahun, untuk itu kita sudah mengantisipasi lebih awal. Dengan anggaran sekitar Rp 800 miliar, kita antisipasi lebih awal dengan bentuk tim khusus dari Kementan. Kita antisipasi dengan memonitor seluruh Indonesia. Kita sudah menyerap, bila ada kekeringan kita minta laporannya. Sejak bulan Januari kita sudah membangun irigasi tersier untuk 1,3 juta ha, upaya lainnya yang telah dilakukan Kementan untuk mengatasi ancaman kekeringan pada lahan pertanian yakni dengan mendistribusikan pompa air ke petani yang mencapai 62 ribu unit. Kemudian sekarang ini ada tambahan 20 ribu unit pompa untuk seluruh Indonesia dari target 62 ribu unit sehingga totalnya menjadi 82

ribu unit. Selanjutnya, kita membangun embung, sumur dangkal, dan sumur dalam di daerah endemis kekeringan di 200 ribu ha di seluruh Indonesia," jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menyatakan bahwa hasil produksi pertanian pada tahun 2015, terutama padi jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2014, produksi padi banyak mengalami gangguan seperti adanya kekeringan, adanya gangguan dari organisme pengganggu tanaman (OPT) dan lahan yang terendam banjir. Akibat masalah-masalah tersebut pada maka antara tahun 2013 dan 2014, sektor pertanian kehilangan lahan seluas 159 ribu hektar (ha) untuk periode Oktober 2013 hingga Juli 2014. Namun pada periode Oktober 2014 hingga Juli 2015, menurun drastis yaitu hanya 52 ribu ha.

"Dengan ada terjadinya serangan OPT, kekeringan, banjir maka lahan yang mengalami kekeringan rata-rata per tahun 190 ribu ha. Dibandingkan tahun lalu, maka untuk tahun ini lebih baik karena Oktober-Juli terjadi kekeringan seluas 159 ribu ha, sedangkan Oktober 2014-Juli tahun ini hanya 52 ribu ha. Artinya ada 120 ribu ha yang diselamatkan, penurunan lahan kering ini lantaran Kementan dan pihak terkait bertindak cepat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lahan pertanian, khususnya kekeringan. Hasilnya, potensi pendapatan petani dari hasil pertanian yang mampu diselamatkan dari kekeringan mencapai Rp 2 triliun" kata Mentan.

Mentan juga mengungkapkan bahwa kegagalan panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), banjir dan kekeringan selama Oktober 2014-Juli 2015 menurun dibanding periode yang sama tahun 2015. Mentan mengklaim bahwa sejumlah upaya yang dilakukannya telah berhasil menekan kegagalan panen hingga berkurang 107.000 ha dibanding tahun sebelumnya.

"Upaya yang kita lakukan membuahkan hasil. Dibanding tahun lalu, kegagalan panen akibat OPT, banjir, dan kekeringan pada Oktober 2014-Juli 2015 lebih sedikit. Dengan perhitungan rata-rata produktivitas per hektar sekitar 5 ton, maka produksi yang berhasil diselamatkan mencapai 500.000 ton" ungkap Mentan.



Antisipasi Ancaman Kekeringan, Kementan Tinjau Langsung dan Berikan Bantuan

"Kementan melakukan antisipasi ancaman kekeringan sebelum kekeringan mencapai puncaknya, sehingga dampak kekeringan yang terjadi tidak akan mengurangi produksi pangan. Antisipasi kekeringan merupakan langkah tepat yang dilakukan dengan bergerak langsung untuk meninjau daerah yang dilanda kekeringan serta dengan memberikan bantuan agar potensi kehilangan produksi pangan akan berkurang. Bantuan tersebut adalah solusi jangka panjang pemerintah dalam mengantisipasi ancaman kekeringan yang melanda"

Pemerintah Indonesia menyiapkan diri untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen, mengingat musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Juli hingga September 2015.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Pertanian akan melakukan peninjauan di beberapa daerah kekeringan, salah satunya di Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur karena daerah tersebut diperkirakan terjadi kekeringan tahun 2015 akan lebih parah dibanding tahun 2014.

"Kementerian Pertanian akan melakukan antisipasi ancaman kekeringan sebelum kekeringan mencapai puncaknya, sehingga dampak kekeringan yang terjadi di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur tidak akan mengurangi produksi pangan" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan peninjauan ke beberapa

lokasi kekeringan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2/7).

Berdasarkan laporan Mentan mengetahui ada dua kecamatan di kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengalami kekeringan sehingga berakibat pada para petani di delapan desa mengalami gagal panen. Delapan desa tersebut di antaranya Desa Kualin, Toineke, Tuafanu, Tuapakas dan Oni di kecamatan Kualin, dan desa Oebelo di kecamatan Amanuban Selatan.

Mentan menjelaskan antisipasi kekeringan merupakan langkah tepat yang dilakukan Kementan dengan bergerak langsung untuk meninjau daerah yang dilanda kekeringan serta dengan memberikan bantuan agar potensi kehilangan produksi pangan akan berkurang. Bantuan tersebut adalah solusi jangka panjang pemerintah dalam mengantisipasi ancaman kekeringan yang melanda wilayah Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Mentan menyatakan sebagai antisipasi mencegah ancaman kekeringan, Kementan akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan ribuan sumur dangkal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Rencananya bakal dibangun 1.000 sumur dangkal sebagai pengairan lahan pertanian di delapan desa, dua kecamatan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sumur tersebut dibangun dengan kedalaman empat meter sampai dengan lima meter.

"Antisipasi kekeringan dengan melakukan pembangunan ribuan sumur dangkal penting dilakukan mengingat di sini ternyata ada sumber airnya. Maka itu kita bangun sumur dangkal karena yang paling



bantuan 40 unit pompa air untuk delapan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemberian 40 pompa air dengan 1.000 sumur dangkal itu merupakan solusi permanen untuk mencegah terjadinya kekeringan di Timor Tengah Selatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Selain 40 pompa air, Mentan juga memberikan tambahan 20 traktor bagi masyarakat di dua kecamatan yakni Kecamatan Amanuban Selatan dan dan Kecamatan Kualin yang daerahnya mengalami rawan pangan

"Bantuan berupa 40 pompa air ini diharapkan dapat membantu warga masyarakat ditambah dengan akan digalinya 1.000 sumur dangkal di daerah ini. Sebelumnya ada 18 traktor yang telah dikirim ke Timor Tengah Selatan, namun hari ini mulai diurus pengirimannya sekitar 20 traktor lagi untuk dikirim ke daerah ini, Kementerian pertanian juga memberikan benih-benih sayuran yang dapat ditanam di daerah tersebut, yang diyakini bisa tumbuh dengan subur dibantu dengan 1.000 sumur galian dangkal dan 40 pompa air" ujar Mentan



dibutuhkan wilayah ini adalah air. Dengan kedalaman dua meter saja, air sudah ada. Itu yang sesuai dengan kondisi setempat. Sumur dangkal memang cocok untuk pengairan di wilayah sini. Sedangkan kalau kita hanya membangun embung dan irigasi, itu memakan waktu yang cukup lama, terlebih membangun itu membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Mentan.

Saat meninjau lokasi rawan pangan di Nusa Tenggara Timur, Mentan memberikan

Di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan desa pertama yang ditinjau oleh Mentan. Peninjauan dilakukan di lokasi penanaman jagung dan sayuran seluas 5 hektare (ha) yang mengalami kekeringan. Mentan menuturkan Kementan telah menyiapkan dana Rp 853 juta, untuk 17 kelompok petani di Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk modal petani menggarap kembali lahan pertanian yang

kekeringan. Tidak hanya itu, Kementan memberikan bantuan 1 ton benih kepada petani di desa tersebut, yang terdiri dari benih sayur sawi, kangkung, cabai merah, cabai keriting, dan cabai besar.

Selain desa Oebelo, Mentan juga meninjau desa Taufanu karena lokasi itu merupakan salah satu desa yang terkena dampak kekeringan paling parah di Timor Tengah Selatan. Untuk desa tersebut, tidak hanya dibangun sumur dangkal, melainkan juga diberikan pompa air dan alat mesin pertanian seperti traktor. Bantuan untuk wilayah Timor Tengah Selatan tidak berhenti sampai di situ. Pihaknya juga menggelontorkan anggaran untuk benih jagung, sayur-sayuran dan hortikultura.

"Kami sudah bantu alsintan 30 unit dan ada tambahan pertama sebanyak lima unit dan kemudian ditambah 10 unit yang kini dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya kami akan tambah 20 unit untuk delapan desa di dua kecamatan di Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Selatan ini juga dapat bantuan benih jagung 3.000 hektare (ha) dengan total 64 ribu untuk Timor Tengah Selatan. Kita harus selesaikan persoalan kekeringan ini dengan waktu yang singkat," ungkap Mentan.

Mentan meminta agar dengan adanya bantuan tersebut, baik pemerintah daerah setempat, serta TNI / Polri dapat membantu para petani untuk mulai mengerjakan pengalihan sumurnya. Sementara itu, Kementan juga akan menambahkan 300 hektare tempat irigasi di daerah Timor Tengah Selatan. Agar petani bisa segera bercocok tanam, Kementan juga sudah memberikan 15 unit pompa air dan akan ditambah sebanyak 20 pompa lagi.

"Bantuan sudah kami kasih, apapun yang petani butuhkan. Sekarang bantuan ada di tangan para petani. Saya minta kepada masyarakat petani dibantu TNI / Polri serta pemerintah daerah dapat mulai bekerja, karena benih sudah ada, sumur dangkal sudah ada dananya, irigasi juga. Sekarang tinggal waktunya bekerja. Segera kerjakan dan bekerja" pinta Mentan.

Kementan Naikan Bantuan Dana UPSUS Untuk Jadikan Sulteng Lumbung Jagung Nasional

"Sulawesi Tengah dijadikan sebagai lumbung jagung nasional. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah sasaran Upsus swasembada padi, jagung, dan kedelai serta sapi potong. Pada tahun 2014 bantuan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah untuk program Upaya Khusus padi, jagung, dan kedelai mencapai Rp 300 miliar dan menjadi Rp 800 miliar tahun 2015"



Kementerian Pertanian mencanangkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lumbung jagung nasional. Untuk itu, Provinsi Sulawesi Tengah harus menyediakan lahan seluas 200 ribu hektar tahun depan untuk ditanami jagung. Sementara untuk tahun 2015 ditargetkan untuk memenuhi produksi jagung hingga 80 ribu hektar. Dengan demikian, anggaran untuk pengembangan jagung akan semakin besar mengalir ke Sulawesi Tengah. Kalau tahun 2014 anggaran untuk Sulawesi Tengah Rp 300 miliar, maka tahun 2015 dinaikan menjadi Rp 800 miliar.



"Untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai lumbung jagung nasional, Kita akan tanam 200 ribu hektar sehingga produksi jagung pada tahun ini, Insya Allah menjadi 80 ribu, dua kali lipat tahun lalu yang hanya 40 ribu. Dengan luas panen jagung sekitar 80 ribu hektar dengan produksi 7 ton/ha berarti terdapat kurang lebih 500 sampai 600 ribu ton jagung. Kalau ini bisa tercapai saya berjanji anggaran akan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1 triliun untuk tahun depan," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, (15/7).

Mentan menyebutkan Kabupaten Sigi yang akan dijadikan lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah sasaran Upsus swasembada padi, jagung, dan kedelai serta sapi potong. Pada 2015 dengan luas baku lahan sawah baru sekitar 22.335 hektar ditargetkan luas tanamnya menjadi 41.951 ha dengan target produksi 213.441 ton.

Mentan memaparkan pada tahun 2014 bantuan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah untuk program Upaya Khusus padi, jagung, dan kedelai mencapai

Rp 300 miliar dan menjadi Rp 800 miliar.

tahun 2015. Adapun target luas tanam jagung di kabupaten Sigi seluas 18.254 Ha dengan realisasi tanam sebesar 36,42 persen dan didukung anggaran Rp 1.314.3125.000 dari APBN. Jika target Upsus Pajale tercapai, maka anggarannya akan ditingkatkan lagi.

"Saat ini anggaran yang diserahkan ke Sulawesi Tengah mencapai Rp 800 miliar, lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 300 miliar dengan areal seluas 80 ribu hektar. Sedangkan yang baru diolah seluas 46 ribu hektar dengan produksi mencapai 171 ribu ton. Pencapaian produksi tersebut, akan dievaluasi pada April sampai September tahun ini. Jika target 80 ribu hektar tersebut tidak tercapai pada waktu tersebut, maka dapat dipastikan anggaran pertanian di Sulawesi Tengah dihapuskan" papar Mentan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Mentan memperingatkan bahwa Kementan akan menghentikan anggaran ke daerah-daerah yang tidak mencapai target produksi pertaniannya seperti tanaman jagung mengingat saat sekarang anggaran

sektor pertanian naik berlipat kali. Sulawesi Tengah di tahun 2014 mendapat alokasi anggaran Rp 300 miliar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 800 miliar.

"Dengan adanya bantuan anggaran Rp 300 miliar menjadi Rp 800 miliar tahun ini untuk Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan pada April-September 2015 produksi jagung bisa mencapai 700 ribu ton. Mudah-mudahan tahun depan anggaran bisa jadi Rp 1 triliun dengan persyaratan produksi jagung terus meningkat," ujar Mentan.

Kepada pemerintah daerah Sulteng, Mentan menegaskan pencaangan 200 ribu hektar perkebunan jagung sebagai lumbung jagung nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu Mentan berjanji bilamana produksi jagung terus mengalami peningkatan, maka Mentan akan memenuhi permintaan daerah penghasil. Tetapi bila target tidak tercapai, maka anggaran daerah Sulawesi Tengah akan dinolkan. Selain perubahan anggaran, maka luas areal tanam juga dirubah dari 40 ribu hektar ditambah 160 ribu hektar, dan pada November 2015 akan langsung dicek.

Di depan petani dan sejumlah pejabat Dinas Pertanian Kota Palu dan Sulawesi

Tengah, Mentan mengaku merasa kecewa dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dari target yang ditetapkan karena realisasi sektor pertanian khusus jagung di Sulawesi Tengah masih rendah dimana Sulawesi Tengah telah menargetkan 74 ribu hektar tetapi baru terealisasi sekitar tujuh ribu hektar.

"Tahun lalu kita impor jagung 3,6 juta ton sebagai solusi pemenuhan jagung nasional. Produksi jagung Provinsi Sulteng harus ditingkatkan. Untuk itu kepada pemprov Sulteng saya himbau agar terus bekerja keras mengembangkan sektor pertanian terutama jagung dan memenuhi

target yang sudah ditetapkan. Ke depan kami ingin canangkan rencana bantuan lahan 40 ribu ha menjadi 200 ribu ha tanaman jagung di Provinsi Sulteng". kata Mentan

Mentan menyempatkan diri melakukan penanaman perdana bibit unggul jenis Pertiwi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Setelah melakukan penanaman jagung dan meninjau kebun jagung, Mentan lalu menyerahkan alat produksi pertanian kepada kelompok petani jagung. Mentan juga meninjau kebun jagung yang sudah mulai berbuah dan menegur penyuluh pertanian karena banyaknya rumput

pengganggu tanaman jagung di kebun jagung tersebut.

"Saya melihat perkebunan jagung di Desa Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah ini masih perlu dipelihara dengan baik karena masih lebih tinggi rumputnya daripada jagungnya sendiri, Akan dilakukan evaluasi pada Desember mendatang. Jika tidak tercapai maka akan mendapatkan rapor merah, Untuk itu harus ada dukungan dari daerah, karena saya tidak segan-segan memberikan rapor merah kepada kabupaten dan kota yang tidak mampu mencapai target" tegas Mentan.

Pemerintah Tetapkan NTB Jadi Lumbung Jagung Nasional

"NTB ditetapkan sebagai lumbung jagung nasional mengingat pengembangan jagung di NTB telah gencar dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui program Pijar atau akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut yang digalakkan sejak tahun 2008. Produksi jagung NTB meroket dari sebelum adanya program Pijar sebesar 350.000 ton menjadi 785.864 ton pada 2014"



Pemerintah RI telah menetapkan sejumlah provinsi di Indonesia, yang akan menjadi lumbung jagung nasional, diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan juga Jawa Timur. Untuk itu Kementerian Pertanian akan menggenjot luas lahan di setiap provinsi tersebut sehingga produksi jagung menjadi meningkat dan Indonesia bisa bebas dari impor jagung di masa depan

"Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjadi lumbung jagung nasional pada tahun 2016. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lumbung jagung yang kedua setelah Provinsi Sulawesi Tengah," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menghadiri rapat koordinasi swasembada pangan dan antisipasi kekeringan NTB, bertempat di Makorem 162 Wira Bhakti di Mataram-NTB (31/7).

Menurut Mentan, penetapan NTB sebagai lumbung jagung nasional

mengingat pengembangan jagung di NTB telah gencar dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui program Pijar atau akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut yang digalakkan sejak tahun 2008. Bahkan berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura NTB bahwa produksi jagung NTB meroket dari sebelum adanya program Pijar sebesar 350.000 ton menjadi 785.864 ton pada 2014.

Mentan menerangkan luas lahan jagung di Kabupaten Sumbawa sampai saat sekarang sebesar 50 ribu hektare (ha) dengan produktivitasnya 7,5 ton per hektare. Karena anggaran dari Kementan untuk Kabupaten Sumbawa akan dinaikan dari Rp50 miliar menjadi Rp130 miliar, maka Pemerintah daerah setempat diharapkan memasang target agar tahun depan dapat meningkatkan



luas lahan jagung sampai 100 ribu hektare. Itu supaya mempercepat pencapaian target swasembada jagung dalam tiga tahun ke depan dan mengangkat perekonomian masyarakat petani.

"Jika stok jagung nasional dipastikan aman, sehingga pemerintah tidak perlu mengadakan impor jagung. Selama petani masih mampu memproduksi jagung, kami tidak akan biar jagung impor masuk. Namun harus didukung peran Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga yang menguntungkan petani, sehingga petani memiliki semangat untuk menanam jagung. Jangan biarkan harga jagung petani rendah yakni di bawah Rp 2.000 per kilogram, Bulog harus serap jagung petani," terang Mentan.

Mentan menegaskan guna mendukung program swasembada jagung nasional. luas areal jagung di NTB bisa ditambah dua kali lipat hingga 250 ribu hektare pada tahun 2015, jika produksi jagung meningkat, maka Indonesia, tidak lagi akan mengimpor jagung. Bahkan sekarang, Indonesia akan mengekspor jagung sebanyak 12 ribu ton.

"Saya pastikan bahwa kita tidak akan lagi mengimpor jagung dari negara lain. Karena pada tahun ini saja Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengekspor jagung sebanyak 125 ribu ton, dan secara nasional pemerintah telah menargetkan ekspor jagung sebesar 300 - 500 ribu ton yang akan kita kirim ke beberapa negara," tegas Mentan.

Mentan mengatakan secara nasional, ekspor jagung Indonesia yang bersumber dari berbagai daerah seperti Gorontalo, Sulawesi Selatan, Dompu, Bima, dan Sumbawa, serta beberapa daerah lainnya telah mencapai sekitar 400 ribu ton.

"Untuk sampai saat ini, ekspor jagung nasional baru sebanyak 400 ribu ton dan khususnya daerah Sumbawa, telah mengekspor jagung sebesar 134 ribu ton. Ke depan harapannya bisa mengekspor jagung hingga 700 ribu ton," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa NTB merupakan salah satu daerah yang menjadi penyumbang swasembada pangan terbesar di Indonesia, terutama hasil pertanian seperti padi, karena hampir sebagian besar daerahnya merupakan lahan pertanian. Dalam upaya swasembada pangan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian selain dengan menggandeng dan melibatkan TNI untuk melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung kepada petani, Pemerintah juga mengucurkan anggaran dana senilai satu triliun rupiah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, produktivitas swasembada pangan dalam bidang pertanian juga diharapkan akan terus semakin meningkat sehingga bisa menopang stok swasembada pangan



nasional.

"Pemerintah akan memberikan anggaran sebesar Rp 1 triliun kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional. Jumlah tersebut meningkat 146 persen dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 400 miliar. Pemerintah menargetkan anggaran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pasalnya, pemerintah ingin menutup aktifitas kran impor beras yang selama ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Insya Allah anggaran tahun ini akan naik, tahun depan akan naik lagi. Itulah bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pangan, komitmen ini kita tidak bisa ditawar lagi karena selama ini kami selalu tahan untuk mengimpor beras" jelas Mentan.

Mentan menambahkan pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketahanan pangan agar tidak perlu lagi mengimpor beras. Salah satunya yaitu penyediaan pompa air sebanyak 20 ribu unit untuk seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membangun embung untuk mengairi sawah-sawah petani. Sedangkan guna mengatasi kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diberikan bantuan 200 unit pompa air.

"Kita berikan 100, kalau sudah terpakai 100 akan kita kirimkan 100 lagi pompa air, pemberian bantuan pompa air dalam jumlah besar ini sebagai langkah kongkrit mengantisipasi kekeringan yang mulai melanda lahan pertanian di NTB pada musim kemarau tahun 2015. Untuk itu, bantuan pompa air kepada para petani NTB secepatnya bisa dikirimkan agar bisa dapat digunakan oleh petani. Hal ini sebagai antisipasi dalam mengatasi kekeringan tersebut" ujar Mentan.

Dalam mengatasi kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mentan menuturkan dari pihak Kementerian Pertanian juga telah membentuk tim khusus yang terdiri

dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pihak terkait yang berkaitan langsung dalam mengatasi bencana kekeringan.

"Nantinya, tim ini akan melakukan pemantauan kekeringan di seluruh NTB. Setelah menemukan daerah kekeringan, kemudian mencari tempat air untuk di pompa dan pemberian sumur bor. Kalau juga tidak ada air bentuk sumur dangkal, seperti yang kita lakukan di NTT dan sekarang airnya sudah bisa mengalir," tutur Mentan.

Mentan juga mengaku telah melakukan sejumlah langkah agar kemarau tahun ini tidak mempengaruhi produksi pertanian. Pasalnya, Kementerian Pertanian telah melakukan antisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau pada tahun 2015, diantaranya dengan mengucurkan dana sebesar Rp884 miliar lebih diperuntukkan pengadaan sejumlah alat penunjang alat pertanian untuk mengatasi kekeringan, membangun infrastruktur irigasi pertanian, pembangunan penampungan air dan penyediaan pompa air.

Mentan mengakui meskipun sejumlah areal tanaman padi dan palawija di Indonesia mengalami kekeringan, namun pihak Kementerian Pertanian memastikan produksi beras dalam negeri cukup dan aman. Oleh karena itu, Mentan menyangkal jika ada pihak yang mengatakan kalau produksi padi tahun 2015 akan turun.

"Produksi padi tidak akan turun, hal ini lantaran luas lahan yang mengalami kekeringan pada tahun ini, menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun lalu ada 200 ribu hektare yang terkena kekeringan, tahun ini diperkirakan ada 100 hektare. Artinya ada 100 hektare lahan yang bisa diselamatkan" imbuh Mentan.

BULOG Siap Serap Gabah Yang Dijual Petani

“Secara total luas lahan panen untuk wilayah Jawa Tengah mencapai 500 ribu ha. Jika 1 ha mampu memproduksi 6 juta ton padi, maka hasil panen bisa mencapai 3 juta ton gabah kering giling. Para petani agar menjual padi hasil produksinya kepada Perum Bulog untuk mengamankan ketersediaan beras Nasional oleh BUMN. Bulog telah siap menyerap gabah petani berapapun banyaknya”



Mentan mengatakan menyambut baik hasil panen padi di Klaten yang sangat menggembirakan. Panen padi tersebut merupakan berkat kerja keras para petani Klaten khususnya dan petani Jawa Tengah pada umumnya sehingga mampu mendukung ketersediaan beras 30 persen, dan diharapkan produksi padi terus dapat ditingkatkan. Hasil panen para petani di desa tersebut sebagian akan diserap oleh Perum Bulog untuk stok beras BUMN tersebut dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Tahun ini produksi padi meningkat hampir 1 juta ton, secara total luas lahan panen untuk wilayah Jawa Tengah mencapai 500 ribu hektar (ha). Jika 1 ha mampu memproduksi 6 juta ton padi, maka hasil panen bisa mencapai 3 juta ton gabah kering giling. Ini merupakan panen perdana, Bulog dapat menyerap gabah para petani, minimal menyerap 500 ribu ton. Baru saja Presiden telah menandatangani dana Penyertaan Modal Negara untuk penyerapan hasil panen. Dananya sudah disiapkan” kata Mentan.

Kepada para petani, Mentan meminta agar menjual padi hasil produksi mereka kepada Perum Bulog untuk mengamankan ketersediaan beras Nasional oleh BUMN. Bulog telah siap menyerap gabah petani berapapun banyaknya, apalagi Presiden baru saja menambah anggaran kepada BUMN Pangan, sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian gabah petani melalui Penyertaan Modal Negara, selain dana yang sudah dimiliki Bulog, saat sekarang sebesar Rp 30 triliun. Bulog diharapkan mampu menyerap gabah Petani sebesar 500 ribu ton, khusus untuk Jawa Tengah, Jatim 500 ribu ton, Jabar 250 ribu ton dan Sulsel 500 ribu ton

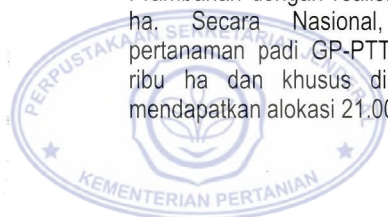
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melakukan panen perdana Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu GPPTT Padi, di Klaten Jawa Tengah pada 27 Juli 2015. Panen Perdana tersebut untuk jenis Mikongga dan Bagendit seluas sekitar 150 hektar yang diperkirakan mampu berproduksi pada kisaran 9,6 ton gabah kering panen - GKP per hektar. Lahan padi yang dipanen merupakan lahan kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Kelompok Tani Dadi Mulyo, Desa Tumpukan Karangdowo, Klaten.

Kabupaten Klaten dengan luas lahan sawah 33.435 ha mendapatkan alokasi GP-PTT padi tahun 2015 sebesar 2500 ha tersebar pada tiga kecamatan yakni, Karangdowo, Manisrenggo, dan Prambanan dengan realisasi tanam 2.441 ha. Secara Nasional, luas areal pertanaman padi GP-PTT mencapai 350 ribu ha dan khusus di Jawa Tengah mendapatkan alokasi 21.000 ha.

Pada panen raya yang dilakukan di Desa Tumpukan, Karang Dowo, Klaten, Jawa Tengah, Mentan didampingi Bupati Klaten, Direktur Bulog, Kepala Drive Bulog Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jateng. Dengan menggunakan arit Mentan memanen padi pertama. Tak hanya dengan arit, Mentan juga memanen padi dengan menggunakan combine harvester atau mesin pemanen atau pemotong padi modern.

Dengan adanya panen tersebut, Mentan menyatakan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan produksi gabah paling baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kenaikan produksi gabah pada periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 mencapai 960 ribu ton.

“Jawa Tengah adalah yang terbaik dari kenaikan produksi dibanding seluruh Indonesia. Produksi ini di Jawa Tengah meningkat 960 ribu ton, jadi kurang lebih sebesar 1 juta ton, Kenaikan ini diharapkan bisa terus dijaga kedepannya” kata Mentan.



“Total dana Bulog termasuk PSO [public sharing obligation kurang lebih Rp 30 triliun Saat ini, Pemerintah menetapkan harga pembelian padi dan beras oleh Bulog untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 3.700 per kg, gabah kering giling (GKG) Rp 4.600 per kg. Meskipun harga pembelian Bulog lebih rendah Rp 100 atau Rp200 per kilogram dari harga pasaran tidak masalah. Serahkan saja ke Bulog untuk kepentingan Nasional. Dengan penyerapan itu, kita pastikan tidak akan ada impor beras, tahun ini,” ujar Mentan.

Mentan juga mengingatkan para petani agar tidak menjual hasil panen dari lahan pertanian mereka ke tengkulak karena selain merugikan petani, juga membuat rantai suplai beras ke masyarakat menjadi panjang sehingga harga beras menjadi mahal.

“Para petani harap menjual hasil produksi pertanian ke Bulog dengan harga sesuai Inpres No. 5/2015. Kami minta tolong, produksi ini sebagian besar diserahkan ke Bulog agar kita tahun ini tidak impor beras, Hasil panen harus masuk ke Bulog karena truk sudah disiapkan,” kata Mentan.

Terkait impor, Mentan menerangkan ketika petani sedang panen raya padi seperti saat sekarang, bila ada keputusan pemerintah untuk impor beras maka itu sama saja menggadaikan petani.

“Untuk itu Pemerintah menegaskan tidak akan membuka impor beras, karena Impor beras ini merugikan para petani. Hal inilah



yang saya tidak mau,” ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa terdapat 200 ribu hektar sawah terancam kekeringan di beberapa wilayah Indonesia sehingga berdampak pada produksi padi. Mentan berharap dampak kekeringan ini tidak membuat Indonesia mengimpor beras dari Negara lain. Dalam mengantisipasi cuaca ekstrem el Nino yang menyebabkan kekeringan di beberapa daerah, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan untuk membuat sumur dalam dan memberikan pompa air kepada petani yang mengalami kekeringan pada lahannya.

Mentan mengakui, kekeringan tahun ini akan membuat beberapa hektar sawah terancam kekeringan. Namun, tahun 2015 diperkirakan angkanya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena keberhasilan Kementerian Pertanian menambah lahan sawah baru dengan total 102.000 hektar. Sehingga bila satu hektar menghasilkan lima ton, maka bisa dapat produksi beras tambahan sebanyak 500 ribu ton atau senilai Rp 2 triliun.





Kementan Akan Kembangkan Perkebunan Buah Skala Luas

“Orang Indonesia memang gemar makan buah-buahan impor salah satunya durian montong, serta klengkeng Thailand pasalnya ukurannya besar dan rasanya manis. Saat sekarang Indonesia juga memproduksi buah-buahan yang juga tidak kalah enakya dengan produk luar Untuk itu Kementerian Pertanian akan mengembangkan perkebunan buah skala luas yang diintegrasikan dengan pabrik pengolahan”

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mengembangkan perkebunan buah skala luas yang diintegrasikan dengan pabrik pengolahan. Pola pengembangan buah berbasis kawasan pabrik rencananya akan melibatkan petani dengan pola pengelolaan bersama. Tersedianya sumber daya manusia dengan kemampuan yang memadai sangat dibutuhkan bagi pengembangan pertanian di pelosok daerah.

“Kementerian Pertanian akan mengembangkan perkebunan buah skala luas yang diintegrasikan dengan pabrik pengolahan. Pola pengembangan buah berbasis kawasan ini melibatkan petani dengan pola pengelolaan bersama” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di sela-sela kunjungan ke kebun buah sekaligus wisata agro Plantera Fruit Paradise, di Desa Sidokumpul, Patean, Kendal, (28/7),

Plantera mengembangkan kebun buah dengan areal pertanaman buah 235 hektar dengan memanfaatkan embung-embung sebagai cadangan air. Saat sekarang di Plantera ditanami durian montong lebih dari 1.500 pohon, 2.000 pohon klengkeng, kebun buah srikaya, kebun cengkeh,

rambutan, pepaya, jambu air, hingga jambu citra.

Dalam kunjungannya di Perkebunan Plantera Kendal Mentan didampingi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) Kementerian Pertanian, jajaran Dinas Pertanian Jawa Tengah dan juga Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Kendal beserta Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pembangunan dan Infrastruktur.

Selama berada di perkebunan buah Plantera Fruit Paradise, Mentan sangat kagum dengan hasil buah yang dihasilkan perkebunan tersebut dan kagum dengan hasil buah yang dikembangkan, mulai dari srikaya, durian montong, hingga yang terbaru buah klengkeng jenis kinglong atau rajanya klengkeng. Tanaman klengkeng tersebut yang sedang berbunga di atas kepalanya. Tinggi tanaman hanya 2 meter, jauh lebih pendek dari tanaman klengkeng pada umumnya.

“Orang Indonesia memang gemar makan buah-buahan impor salah satunya durian montong, serta klengkeng Thailand pasalnya ukurannya besar dan rasanya manis. Saat ini Indonesia juga memproduksi buah-buahan yang juga

tidak kalah enakya dengan produk luar pasalnya para petani Indonesia mulai mengembangkan buah-buahan dengan varietas unggul. Saya yakin bila banyak desa punya kebun seperti Plantera, Indonesia akan kalahkan produk buah asal Thailand” ujar Mentan.

Untuk dapat mengalahkan buah-buahan dari Thailand, Mentan mengatakan, Kementan akan mengalokasikan anggaran Rp 300 miliar untuk pengembangan 10 kebun buah di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Luas tiap kawasan 10 ha. Perkembangan kawasan akan dilihat dan akan direplikasi hingga skala nasional.

“Cita-cita saya adalah dapat kalahkan Thailand dengan menggarap kebun 5.000 hektar yang terintegrasi ternak dan sapi. Langkah kita, langsung buat pilot project 10 desa minimal dengan anggaran Rp 300 miliar. Coba dulu di 2 desa di Kalimantan, 2 desa di Sulawesi dan di Jateng. Replikasi dari Plantera ini, hasilnya ini lebih besar dari Thailand,” kata Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemilik Kebun Buah Plantera, Budi Dharmawan mengatakan, di kebun Plantera ditanami berbagai macam buah-buahan diantaranya

durian, klengkeng, rambutan, buah naga, sirkaya, papaya, kelapa kopyor, jeruk, jambu biji hingga jambu citra bahkan disana terhampar luas tanaman cengkeh.

"Untuk bibit Sirkaya memang didatangkan dari Australia lalu dikembangkan disini. Saat ini cita-cita saya ingin mengembangkan buah-buahan Indonesia dengan harapan masyarakat kita tidak mengandalkan produk luar negeri terus" kata Budi.

Budi menerangkan melalui Yayasan Obor Tani, pengelola juga mengembangkan 200 ha kebun buah rakyat yang tersebar di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan luasan minimal 10 ha per kawasan yang biasanya cepat berkembang menjadi 20 ha dengan dukungan dana tanggung jawab

sosial perusahaan (CSR). Para petani dengan luas kepemilikan lahan kecil dikelompokkan menjadi 1 kelompok dengan anggota 50-60 petani.

"Lahan mereka diberi bibit dan ditanami buah. Para petani mendapat pendampingan hingga akses pemasaran dengan dukungan dana itu. Setelah 3 tahun, petani dibiarkan mengelola sendiri kebun buah itu. Apabila belum mampu memasarkan sendiri, petani bisa memasarkan lewat yayasan tersebut" terang Budi.

Budi juga mengatakan, pola yang sama juga dilakukan Thailand dan Tiongkok dalam pengembangan kebun buah mereka. Di Tiongkok, setiap 5 kawasan kebun buah dibangun satu unit pabrik pengolahan buah

sehingga bisa menjamin serapan buah masyarakat.

"Yang harus diketahui dalam pengembangan buah adalah soal standar, misalnya pengelola mengetahui standar kualitas tanaman, standar buah berkualitas, standar pemupukan dan perawatan yang baik, serta penanggulangan penyakit" kata Budi.

Budi menambahkan di area kebun buah Plantera, sengaja dibuat embung-embung air seperti halnya waduk mini hal ini bertujuan untuk menampung air untuk menyirami seluruh tanaman, sehingga apabila terjadi musim kemarau seperti saat ini, embung-embung tersebut dapat menampung air dan nantinya disalurkan ke tanaman-tanaman sekitarnya.

Bahas Serapan Beras Mentan Briefing Pejabat Lingkup Kementan

"Serapan beras oleh Bulog akan diwujudkan dengan bersinergi dengan Kemen Kop dan UKM untuk membantu membuka akses kepada para petani dengan membeli beras sesuai dengan HPP. Khusus daerah surplus beras seperti SulSel, JaBar, JaTim, SumUt, dan NTT, nantinya akan mendapat target serapan beras lebih tinggi. Kementan juga menyiapkan anggaran untuk mempercepat serapan beras oleh Bulog di daerah masing-masing. Ada bantuan PMN sekitar Rp 3 triliun"



Guna membahas kondisi terakhir serapan beras Bulog dan langkah strategi yang akan dilakukan untuk mempercepat target yang telah diinstruksikan oleh Presiden, maka Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyempatkan diri menggelar briefing dengan sejumlah pejabat di lingkup Kementerian Pertanian dan mitra kerja di Sulawesi Selatan di sela acara open house di kediaman Wapres Jusuf Kalla, di Makassar Sulawesi Selatan (19/7).

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pangdam VII Wirabuana, perwakilan Dolog Divre Sulawesi Selatan dan Barat, dan sejumlah perangkat kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Mentan mengatakan serapan beras oleh Bulog akan diwujudkan dengan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk membantu membuka

akses kepada para petani dengan membeli beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Ada juga pelibatan TNI-AD hingga ke pelosok perdesaan, contohnya di Nusa Tenggara Timur, Babinsa cukup berhasil membantu petani di perdesaan. Khusus daerah surplus beras seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, nantinya akan mendapat target serapan beras lebih tinggi. Di Nusa Tenggara Timur serapan naik sebesar 300 persen, Sebelumnya penyerapan beras di Sulawesi Selatan sebesar 500 ribu ton hal itu karena produksi di daerah tersebut naik dengan begitu serapan beras pun ditingkatkan menjadi dua kali lipat" kata Mentan.

Untuk meningkatkan serapan beras, Mentan mengungkapkan Kementerian Pertanian juga menyiapkan anggaran untuk mempercepat serapan beras oleh Bulog di daerah masing-masing. Ada bantuan Penyertaan Modal

Negara (PMN) sekitar Rp 3 triliun. Dengan adanya stok beras nasional sekitar 1,7 juta ton maka penyerapan beras akan terus dilakukan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pelaksana tugas, hingga mencapai target 4 juta ton hingga akhir tahun. Kalau diakselerasi dalam dua bulan maka terdapat serapan dua juta ton

"Sulawesi Selatan dapat surplus sebesar 3 juta ton pada tahun ini. Sedangkan target serapan di Sulawesi Selatan naik menjadi 1 juta ton dari sebelumnya 500 ribu ton. Per hari ini terdapat stok nasional sekitar 1,7 juta ton. Target serapan sampai akhir tahun 4 juta ton, dan kita mau akselerasi dalam dua bulan ini 2 juta ton, Sedangkan capaian Provinsi Sulsel yang mengalami surplus produksi padi hingga tiga juta ton. Hal tersebut akan sangat membantu percepatan penyerapan beras. Karenanya, target serapan di Sulsel oleh Bulog pun naik dua kali lipat menjadi satu juta ton" ungkap Mentan.





Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO UMUM DAN HUMAS
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id